



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

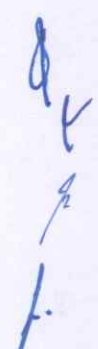
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 100 TAHUN  
2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi Dinas Perhubungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 101);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 101), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perhubungan Darat dan Udara;
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai;
- e. Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perencanaan, pengembangan, pengendalian pengawasan transportasi dan penerangan jalan umum.

(2) Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan transportasi dan penerangan jalan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:



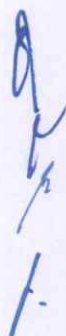
### Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) membawahi:
    - a. Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Transportasi; dan
    - b. Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Sarana Transportasi dan Penerangan Jalan Umum.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan transportasi.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Transportasi mempunyai fungsi:
    - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Transportasi;
    - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan transportasi;
    - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan transportasi;
    - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan transportasi;
    - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan transportasi; dan
    - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 29

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas penerangan jalan umum.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:
- 

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Penerangan Jalan Umum;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penerangan jalan umum;
  - c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas penerangan jalan umum;
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penerangan jalan umum;
  - e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penerangan jalan umum; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal ~~22 oktober~~ 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

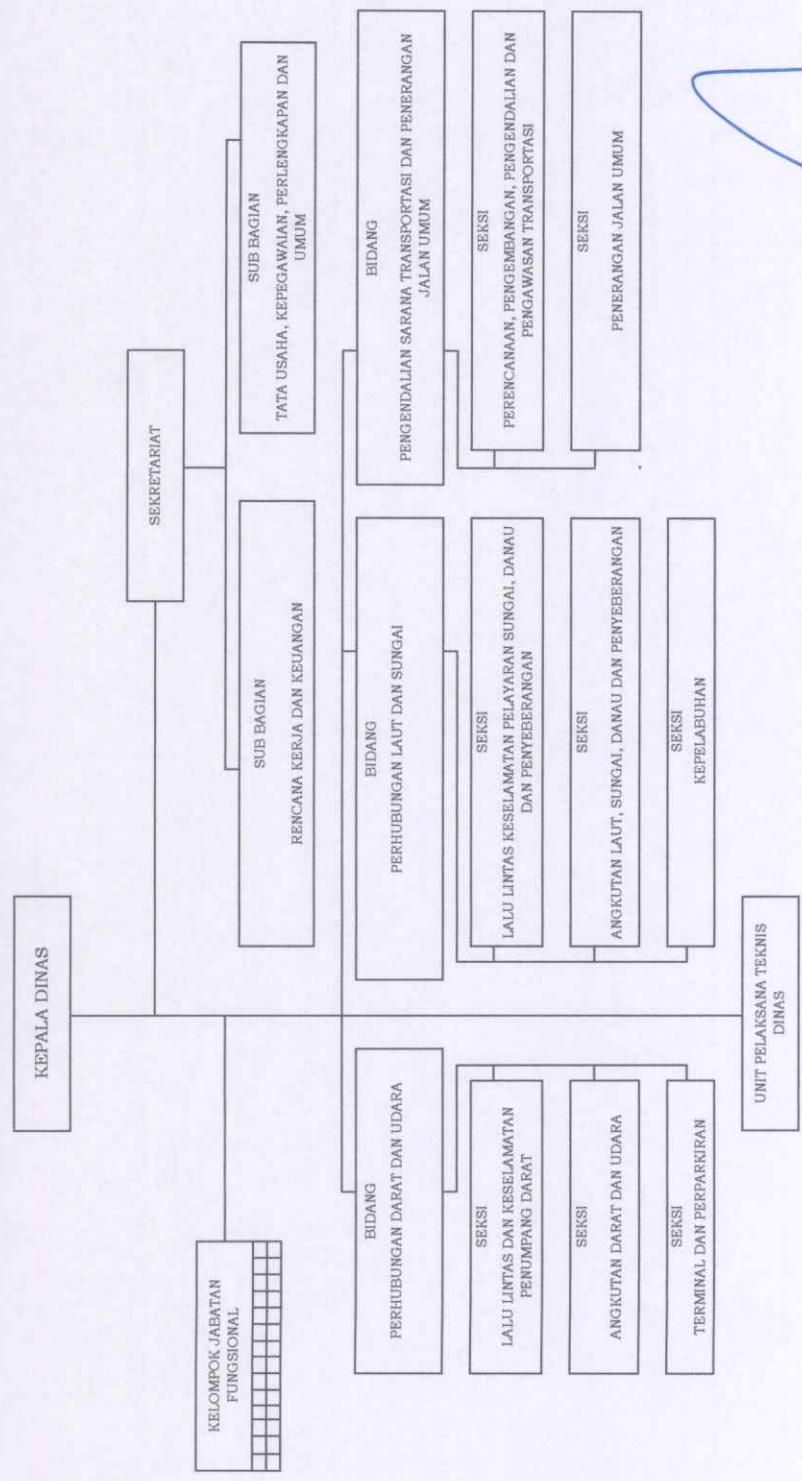
YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 84



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 84 TAHUN 2020  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,  
 MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Raya  
 pada tanggal 22 Oktober 2020  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAMANIZAM  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2020 NOMOR 84